

## Sosialisasi Dokumen Pendukung Perencanaan Partisipatif di Kabupaten Tolikara

Yannice Luma Marnala Sitorus<sup>1</sup>, Normalia Ode Yanthy<sup>2</sup>, Syamsudin Usman<sup>3</sup>,  
Anggia Riani Nurmaningtyas<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Sains dan Teknologi Jayapura  
<sup>1</sup>nalaustj2006@gmail.com

*Received: 24 Juni 2022; Revised: 3 April 2023; Accepted: 18 Juni 2023*

### **Abstract**

*The low level of community participation in Tolikara Regency in development planning and the lack of achievement of the objectives of several development programs have prompted the local government to take the initiative to change the development planning strategy there, starting with collecting data on the basic needs of the village community and existing public service problems by a third party. this is implemented by the NGO Ilalang. This step was taken considering the lack of basic data needed by the government in order to foster district and village leaders in the preparation of development programs in their respective regions. The limited infrastructure for basic services for the people, such as transportation, and the low quality of human resources are the main factors contributing to the low level of citizen participation there. Through the dissemination of supporting documents and development program strategies to the district government, it is hoped that there will be an expansion of basic information to village heads so as to increase community participation in providing development program proposals in each village. The socialization is in the form of an explanation of the composition of supporting documents that are easily accessible and the proposed development program after analyzing the supporting documents. Each district head is expected to be able to assist the village government when accessing supporting documents and to develop their own more detailed development programs tailored to the conditions in each village.*

**Keywords:** *human resources; participatory planning; village government*

### **Abstrak**

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Tolikara dalam perencanaan pembangunan dan belum tercapainya tujuan beberapa program pembangunan mendorong pihak pemerintah setempat berinisiatif untuk mengubah strategi perencanaan pembangunan di sana, yaitu diawali dengan pendataan kebutuhan dasar masyarakat kampung dan permasalahan layanan publik yang ada oleh pihak ketiga, dalam hal ini dilaksanakan oleh LSM Ilalang. Langkah tersebut dilakukan mengingat masih minimnya data dasar yang diperlukan pihak pemerintah dalam rangka membina para pimpinan distrik dan kampung pada penyusunan program pembangunan di wilayahnya masing-masing. Keterbatasan sarana prasarana layanan dasar penduduk, seperti transportasi, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, menjadi faktor utama penyumbang rendahnya tingkat partisipasi warga di sana. Lewat sosialisasi dokumen pendukung dan strategi program pembangunan pada pemerintah distrik, diharapkan ada perluasan informasi dasar pada kepala-kepala kampung sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan

usulan-usulan program pembangunan di setiap kampung. Sosialisasi tersebut berupa pemaparan susunan dokumen pendukung yang mudah diakses dan usulan program pembangunan setelah menganalisis dokumen pendukung tadi. Setiap kepala distrik diharapkan dapat mendampingi pemerintah kampung saat mengakses dokumen pendukung dan menyusun sendiri program pembangunan mereka yang lebih detail disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap kampung.

**Kata Kunci:** pemerintahan kampung; perencanaan partisipatif; sumber daya manusia

## A. PENDAHULUAN

Kabupaten Tolikara merupakan kabupaten dengan angka persentase penduduk miskin tinggi di Provinsi Papua, yaitu sebesar 32,90% (BPS Provinsi Papua, 2019). Angka ini sudah turun sebesar 0,24% dari tahun sebelumnya yang sebesar 33,14%. Faktor penyumbang angka kemiskinan ini adalah kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi secara memadai, seperti: kebutuhan pangan, pertanian, infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan, telekomunikasi dan informatika, transportasi, akses air bersih, kesehatan, perdagangan, perumahan, perhubungan dan masalah-masalah sosial lainnya. Menurut data Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) di Papua, Kabupaten Tolikara memiliki persentase tertinggi yakni 0,597 sedangkan IKM terendah berada di Kota Jayapura yaitu sebesar 0,062. Faktor yang menyebabkan IKM Kabupaten Tolikara tinggi diantaranya: ketersediaan sarana prasarana dan pelayanan kesehatan yang masih kurang, ketersediaan sarana prasarana dan pelayanan pendidikan yang belum maksimal dan standar hidup untuk menghasilkan barang dan jasa masih sangat rendah. Untuk bahan bakar memasak, sebanyak 95,84% masyarakat masih menggunakan kayu bakar yang akan berdampak pada penebangan pohon yang dapat merusak hutan, 91,63% warga tidak memiliki sanitasi yang baik dan 88,80% warga memperoleh air minum belum sesuai standar Kesehatan (BPS Provinsi Papua, 2019).

Program Otonomi Khusus (Otsus) baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Papua belum memberikan solusi yang komprehensif terhadap permasalahan yang terjadi di Kabupaten Tolikara. Ini antara lain

dikarenakan pendekatan dalam perencanaan pembangunan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat (pendekatan partisipatif) terutama dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di kampung-kampung. Dengan demikian perencanaan strategi dan program yang dibuat belum secara langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat meskipun selama ini pendekatan partisipatif telah dilakukan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), baik dari tingkat kampung sampai dengan kabupaten. Partisipasi masyarakat ini belum dikelola secara maksimal dan perencanaan disusun belum berdasarkan kebutuhan dasar riil masyarakat kampung yang berada di Kabupaten Tolikara.

Perencanaan yang dijalankan selama ini cenderung bersifat *top-down*, yaitu dari pihak pemerintah untuk masyarakat sementara idealnya adalah perencanaan itu bersifat *bottom-up* karena masyarakat-lah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan dan konsep pemberdayaan masyarakat atau pendekatan partisipatif merupakan salah satu strategi untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan program pembangunan di wilayahnya masing-masing (Adiyoso, 2009; Browne, 2014; Chambers, 2001).

Widodo, et al. (2014) menyatakan bahwa desa memerlukan pendampingan demi mendorong perluasan kesejahteraan masyarakatnya, antara lain lewat upaya sosialisasi kepada perangkat desa dan pengurus kelembagaan desa, untuk memberi pemahaman isi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa, serta penyusunan program partisipatif berbasis

## Sosialisasi Dokumen Pendukung Perencanaan Partisipatif di Kabupaten Tolikara

Yannice Luma Marnala Sitorus, Normalia Ode Yanthy, Syamsudin Usman, Anggia Riani Nurmaningtyas

kebutuhan dan potensi desa. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga kampung di Kabupaten Tolikara, pihak pemerintah setempat juga perlu mengambil inisiatif untuk mendampingi mereka, antara lain dalam setiap perencanaan program pembangunan kampung.

Dengan melihat permasalahan tersebut di atas maka kemudian Pemerintah Kabupaten Tolikara melakukan identifikasi kebutuhan dasar riil masyarakat kampung di Kabupaten Tolikara dengan pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat kampung di Kabupaten Tolikara. Kegiatan ini kemudian dilimpahkan pada LSM Ilalang selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan tersebut yang juga melibatkan staf pengajar Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ). Tim dari USTJ bertugas untuk memberi masukan sebelum survei dilaksanakan dan menyusun strategi pembangunan kampung setelah dokumen pendukung hasil survei dianalisis. Laporan ini menjadi acuan bagi pihak pemerintah, khususnya Bappeda Kabupaten Tolikara, dalam mengarahkan program pembangunan di setiap kampung pada 25 distrik yang ditinjau. LSM Ilalang juga diminta untuk melakukan sosialisasi dokumen pendukung yang dimaksud dan strategi program pembangunan yang disusun, baik kepada pihak Pemerintah Kabupaten Tolikara maupun para kepala distrik pada 25 distrik yang dikaji.

### B. PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif dalam analisis data. Data diperoleh dari hasil wawancara surveyor dengan kepala kampung dan penduduk kampung di Kabupaten Tolikara. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Tolikara sementara akses ke berbagai daerah masih sulit maka kegiatan ini dibatasi pada 25 distrik yang berada di sekitar ibu kota Kabupaten Tolikara (tahap 1). Direncanakan pada tahun berikut akan diteruskan pada 21 distrik lainnya. Survei ke kampung-kampung sebanyak 306 wilayah administrasi kampung/kelurahan dilakukan selama 3 bulan yang dimulai pada bulan

September 2021. Data dan hasil analisis kemudian ditampilkan pada aplikasi dalam Excel sehingga lebih informatif dan mudah diakses. Berdasarkan data pada dokumen pendukung ini kemudian disusun usulan program pembangunan menurut 3 kategori karakteristik kampung di 25 distrik.

Kemudian pada bulan Desember 2021, dilakukan sosialisasi pada instansi pemerintah, yang terdiri dari dinas-dinas pada pemerintahan kabupaten dan kepala-kepala distrik, berupa pemaparan susunan dokumen pendukung pada aplikasi Excel yang mudah diakses dan usulan program pembangunan setelah menganalisis dokumen pendukung tadi. Setiap kepala distrik diharapkan dapat mendampingi pemerintah kampung saat mengakses dokumen pendukung tersebut dan menyusun sendiri program pembangunan mereka yang lebih detail disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap kampung. Kegiatan sosialisasi seperti ini akan menjadi tempat diskusi dan konsultasi para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan partisipasi warga pada perencanaan pembangunan di kampung.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Kabupaten Tolikara terletak pada titik koordinat  $4^{\circ}08'$  -  $7^{\circ}10'$  Lintang Selatan dan  $139^{\circ}00''$ - $139^{\circ}15''$  Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Tolikara mempunyai batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kabupaten Mamberamo Raya
2. Sebelah Timur: Kabupaten Mamberamo Raya
3. Sebelah Selatan: Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya
4. Sebelah Barat: Kabupaten Puncak Jaya

Wilayah Kabupaten Tolikara yang memiliki luas  $14.263 \text{ km}^2$  terdiri dari 46 distrik, 541 kampung dan 4 kelurahan dengan ibukota kabupaten berada di Karubaga. Jumlah penduduk Kabupaten Tolikara pada tahun 2018 adalah sebanyak 137.695 jiwa dan meningkat menjadi 139.111 jiwa pada tahun 2019, laju pertumbuhan penduduk rata-rata

yaitu sebesar 1,01 persen (BPS Kab. Tolikara, 2020).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tolikara berada pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Suhu udara rata-rata tertinggi di Kabupaten Tolikara terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 29,6<sup>o</sup> Celsius, sedangkan rata-rata suhu udara terendah di kabupaten ini terjadi pada bulan September yaitu sebesar 10,3<sup>o</sup> Celsius. Kelembaban udara tertinggi di Kabupaten Tolikara rata-rata mencapai 77% di bulan Juni dan Juli, sedangkan yang terendah adalah di bulan Februari yang rata-rata mencapai 60%. Untuk kondisi curah hujan di Kabupaten Tolikara, tertinggi terjadi di bulan April sebesar 266,9 mm. Jumlah hari hujan tertinggi di Kabupaten Tolikara terjadi di bulan Maret yaitu sebanyak 26 hari hujan dalam bulan tersebut, sedangkan terendah terjadi di bulan September yang jumlah hari hujan setiap bulan hanya sebanyak 12 hari hujan (BAPPEDA Kab. Tolikara, 2012).

Pada kegiatan Penyusunan Dokumen Pendukung Perencanaan Partisipatif di Kabupaten Tolikara tahap pertama ini dilakukan pengambilan data pada 25 distrik, meliputi Distrik Kanggime, Woniki, Nabunage, Gilibandu, Wakuo, Aweku, Bogonuk, Karubaga, Wunin, Nelawi, Kuari, Biuk, Bokondini, Bokoneri, Kembu, Umagi, Poganeri, Nunggawi, Kubu, Anawi, Wugi, Geya, Wenam, Yuneri dan Yuko. Pengambilan data dilakukan di 302 kampung dan 4 kelurahan, yang tersebar pada 25 distrik tersebut di atas, melibatkan 6.478 responden yang terdiri dari 6.087 pria dan 391 wanita (lihat juga Gambar 1). Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala antara lain: penolakan dari warga kampung yang akan disurvei, medan yang sangat sulit dijangkau karena topografi berbukit sementara itu tidak tersedia sarana serta prasarana transportasi, dan keterbatasan komunikasi akibat masih rendahnya penguasaan Bahasa Indonesia oleh warga setempat.

Dokumen pendukung ini disusun dalam aplikasi Excel yang antara lain berupa tabulasi

jawaban responden. Tabulasi jawaban responden tersebut diklasifikasikan ke dalam 13 kelompok data, meliputi : Karakteristik Responden, Profil Rumah Tangga, Kependudukan, Pendidikan, Konsumsi Pangan, Produksi Pertanian, Layanan Kesehatan, Infrastruktur Perumahan, Fasilitas dan Transaksi Keuangan, Infrastruktur Industri, Akses Perhubungan Masyarakat, Komunikasi, dan Biaya Pengeluaran Bulanan.



Sumber: Ilalang, 2021

Gambar 1. Kegiatan Wawancara Warga Distrik Kanggime

Data-data pada dokumen pendukung tersebut di atas kemudian digunakan untuk menganalisis Indeks Pembangunan Desa (IPD). Tingkat kemajuan suatu desa atau kampung dapat dilihat antara lain dari Indeks Pembangunan Desa (IPD)-nya. Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang disusun menggunakan beberapa dimensi, variabel, dan indikator kuantitatif untuk menggambarkan tingkat kemajuan desa pada suatu waktu. Di Papua, IPD ini dikenal juga dengan istilah IPK (Indeks Pembangunan Kampung). IPK pada kegiatan ini disusun berdasarkan data kampung hasil pendataan yang telah dilaksanakan pada 25 distrik di Kabupaten Tolikara.

IPK yang diperoleh merupakan nilai yang berlaku relatif di Kabupaten Tolikara. Demikian pula dengan pembagian tipologi kampung, disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Tolikara. Kampung di Kabupaten Tolikara terdiri dari tiga tipologi, yaitu: kampung belum berkembang (IPK <23,40), kampung sedang berkembang (IPK 23,40 – 31,89), dan kampung berkembang (IPK > 31,89).

Pada 25 distrik di Kabupaten Tolikara yang dikaji ini terdapat 89,87% kampung belum berkembang, 9,48% kampung sedang berkembang, dan 0,65% kampung

## Sosialisasi Dokumen Pendukung Perencanaan Partisipatif di Kabupaten Tolikara

Yannice Luma Marnala Sitorus, Normalia Ode Yanthy, Syamsudin Usman, Anggia Riani Nurmaningtyas

berkembang. Bila mengacu pada ketentuan pemerintah pusat, tipologi desa terdiri dari: desa tertinggal dengan  $IPD \leq 50$ , desa berkembang dengan  $IPD > 50$  sampai  $\leq 75$ , dan desa mandiri dengan  $IPD > 75$  (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2015), dan

sesungguhnya seluruh kampung/kelurahan pada 25 distrik di Kabupaten Tolikara ini merupakan desa tertinggal karena memiliki IPK di bawah 50. Adapun IPK pada salah satu distrik dari 25 distrik yang dikaji dapat dilihat pada Gambar 2.

NO.	KAMPUNG	DIMENSI				IP KAMPUNG	Tipologi Kampung	
		Pelayanan Dasar (Fas. Pendidikan, Fas. Kesehatan)	Kondisi Infrastruktur (Ekonomi, Energi, Air & Sanitasi, Kominfo)	Aksesibilitas/Transportasi (Sarpras Transport & Akses)	Pelayanan Umum (KLB & OR)			Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (SDM, Sarpras Kampung)
1	Aulani	6.154062	4.80479	6.661578	4.04455	4.084032	25.75	Sedang Berkembang
2	Kel. Kanggime	8.28243	7.01753	7.870164	4.714506	8.078242	35.96	Berkembang
3	Logon	2.783802	4.163178	3.839538	4.04455	2.966548	17.80	Belum Berkembang
4	Marlo	2.142236	5.446402	4.487792	4.04455	2.966548	19.09	Belum Berkembang
5	Dundu	2.142236	4.80479	3.839538	4.04455	2.966548	17.80	Belum Berkembang
6	Ligimbak	5.533116	4.80479	6.661578	4.04455	2.966548	24.01	Sedang Berkembang
7	Kugimaluk	4.89155	5.446402	6.395242	4.04455	5.202522	25.98	Sedang Berkembang
8	Purugi	3.418616	5.446402	4.487792	4.04455	2.966548	20.36	Belum Berkembang
9	Kerena	5.533116	5.446402	8.60634	4.04455	4.084032	27.71	Sedang Berkembang
10	Lawor	4.89155	5.446402	7.69175	4.04455	2.966548	25.04	Sedang Berkembang

Sumber: Ilalang, 2021

Gambar 2. Indeks Pembangunan Kampung di Distrik Kanggime

Tabel 1. Matriks SWOT Kampung Berkembang

EFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
	IFAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komoditas unggulan pertanian dan peternakan</li> <li>Lahan adat yang luas</li> <li>Mayoritas warga adalah OAP</li> <li>Fasilitas dasar relatif lengkap (SD-SMA dan Puskesmas)</li> <li>Ada fasilitas ekonomi (bank dan pasar)</li> <li>Lembaga keagamaan punya peran penting dalam pembangunan</li> </ol>
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<ol style="list-style-type: none"> <li>Dana Desa</li> <li>Dana Perimbangan Otsus</li> <li>Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Indonesia Timur</li> <li>Keberpihakan kepada OAP baik oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah</li> <li>Kota Wamena berpotensi sebagai tempat pemasaran produk-produk dari Tolikara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan dana desa yang optimal untuk meningkatkan perekonomian petani</li> <li>Pemanfaatan dana Otsus untuk memperkuat lembaga adat di kampung</li> <li>Peningkatan kualitas layanan publik</li> <li>Penyiapan badan usaha ekonomi kampung</li> <li>Peningkatan peran tokoh agama dalam setiap kegiatan pembangunan kampung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas SDM pemerintahan kampung dan lembaga adat lewat pelatihan/ pendampingan/ studi banding</li> <li>Pengadaan tenaga layanan publik dari luar yang diberi insentif memadai</li> <li>Pengadaan/peningkatan kapasitas sumber pembangkit tenaga listrik</li> <li>Sosialisasi dampak negatif penggunaan kayu bakar, pengadaan BBM bersubsidi (minyak tanah)</li> <li>Sosialisasi dampak negatif BAB sembarangan, pengadaan fasilitas sanitasi komunal dilengkapi jaringan suplai air bersih</li> </ol>
TREATHS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum terbentuknya sistem pasar, baik lokal maupun regional, yang dapat menampung hasil panen petani; konsumen umumnya merupakan warga pendatang yang jumlahnya masih sedikit</li> <li>Komoditas unggulan (pertanian) sama dengan komoditas dari Wamena yang punya akses transportasi lebih baik</li> <li>Ketidaklancaran pasokan BBM dari luar Tolikara</li> <li>Kurikulum pendidikan yang disamaratakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun komunitas petani tingkat kampung</li> <li>Peningkatan akses ke fasilitas ekonomi dari kampung-kampung sekitar</li> <li>Pemberian subsidi transportasi pengadaan BBM</li> <li>Pemerintah setempat dapat menyesuaikan kurikulum pendidikan sesuai kebutuhan (menambah muatan lokal)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menciptakan 'sistem pasar lokal' dengan menumbuhkan kebutuhan keberagaman pangan dari warga lokal, misal mengubah pola konsumsi harian warga, agar terjadi proses 'jual beli' hasil pertanian antar warga setempat</li> <li>Pemerintah memberdayakan petani sekaligus mempersiapkan pasar untuk menampung hasil panen (sifatnya stimulus)</li> <li>Pendidikan/pelatihan dan pendampingan warga berdasarkan kebutuhan (kurikulum lokal)</li> </ol>

Sumber: Ilalang, 2021

Langkah selanjutnya adalah menyusun usulan program pembangunan setelah melakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Dari hasil analisis terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kampung-kampung di Kabupaten Tolikara dengan tipologi sejenis

pada umumnya memiliki faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang relatif sama sehingga penyusunan arah kebijakan dan strategi pembangunan kampung akan disusun dalam 3 matriks sesuai dengan tipologi kampung yang ada (lihat Tabel 1, 2, dan 3).

Tabel 2. Matriks SWOT Kampung Sedang Berkembang

EFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
	<p><b>IFAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komoditas unggulan pertanian dan peternakan</li> <li>2. Lahan adat yang luas</li> <li>3. Mayoritas warga adalah OAP</li> <li>4. Lembaga keagamaan punya peran penting dalam pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM pemerintahan kampung dan adat</li> <li>2. SDM petani/ peternak/ pedagang (mayoritas tidak sekolah, tidak ada spesialisasi produk)</li> <li>3. Tenaga pelayanan publik (guru dan nakes) minim</li> <li>4. Fasilitas dan infrastruktur dasar minim</li> <li>5. Potensi kerusakan lingkungan besar (mayoritas menggunakan kayu bakar untuk memasak), penyebaran penyakit akibat tidak ada sanitasi</li> </ol>
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana Desa</li> <li>2. Dana Perimbangan Otsus</li> <li>3. Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Indonesia Timur</li> <li>4. Keberpihakan kepada OAP baik oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah</li> <li>5. Kota Wamena berpotensi sebagai tempat pemasaran produk-produk dari Tolikara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan dana desa yang optimal untuk meningkatkan perekonomian petani</li> <li>2. Pemanfaatan dana Otsus untuk kekuatan lembaga adat di kampung</li> <li>3. Menyiapkan badan usaha ekonomi kampung</li> <li>4. Memaksimalkan peran tokoh agama dalam setiap kegiatan pembangunan kampung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas SDM pemerintahan kampung dan lembaga adat lewat pelatihan/ pendampingan/ studi banding</li> <li>2. Pendidikan/pelatihan warga berdasarkan kebutuhan (kurikulum lokal)</li> <li>3. Peningkatan akses ke kampung/kelurahan dengan fasilitas layanan yg lebih lengkap</li> <li>4. Pengadaan/peningkatan kapasitas sumber pembangkit tenaga listrik</li> <li>5. Sosialisasi dampak negatif penggunaan kayu bakar, pengadaan BBM bersubsidi (minyak tanah)</li> <li>6. Sosialisasi dampak negatif BAB sembarangan, pengadaan fasilitas sanitasi komunal dilengkapi jaringan suplai air bersih</li> </ol>
TREATHS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terbentuknya sistem pasar, baik lokal maupun regional, yang dapat menampung hasil panen petani; konsumen umumnya merupakan warga pendatang yang jumlahnya masih sedikit</li> <li>2. Komoditas unggulan (pertanian) sama dengan komoditas dari Wamena yang punya akses transportasi lebih baik</li> <li>3. Ketidaklancaran pasokan BBM dari luar Tolikara</li> <li>4. Kebijakan pembiayaan oleh pemerintah belum memperhatikan kondisi lokal (biaya hidup tinggi)</li> <li>5. Kurikulum pendidikan yang disamaratakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun komunitas petani tingkat kampung</li> <li>2. Peningkatan akses ke fasilitas ekonomi</li> <li>3. Pemberian subsidi transportasi pengadaan BBM</li> <li>4. Pemerintah setempat dapat menyesuaikan kurikulum pendidikan sesuai kebutuhan (menambah muatan lokal)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan 'sistem pasar lokal' dengan menumbuhkan kebutuhan keberagaman pangan dari warga lokal, misal mengubah pola konsumsi harian warga, agar terjadi proses 'jual beli' hasil pertanian antar warga setempat</li> <li>2. Pemerintah memberdayakan petani sekaligus mempersiapkan pasar untuk menampung hasil panen (sifatnya stimulus)</li> <li>3. Peningkatan kualitas SDM pemerintahan kampung dan lembaga adat lewat pelatihan/ pendampingan/ studi banding</li> <li>4. Pendidikan/pelatihan dan pendampingan warga berdasarkan kebutuhan (kurikulum lokal)</li> </ol>

Sumber: Ilalang, 2021

Perencanaan partisipatif oleh pemerintah setempat dilakukan diawali dengan pengumpulan data kebutuhan dasar dan identifikasi permasalahan yang ada pada warga oleh pihak luar, dalam hal ini LSM Ilalang, atas penugasan dari Pemerintah Kabupaten Tolikara. Partisipasi di sini baru dilaksanakan sebatas pada keterlibatan warga saat memberikan jawaban atau informasi yang dibutuhkan oleh pihak luar atau pihak pemerintah. Walaupun desain kuesioner yang diajukan pada penduduk telah melalui proses

agar diperoleh desain pertanyaan yang dianggap paling tepat tetapi akan lebih baik bila warga sendiri yang mengajukan permasalahannya. Hal ini dimaksudkan agar warga terbiasa berpikir kritis dan segera mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi di kampungnya masing-masing dengan atau tanpa adanya pihak luar/pemerintah. Warga kampung diharapkan untuk bergerak sendiri dan secara bersama-sama mengatasi permasalahan mereka (masyarakat berdaya). Akan tetapi penduduk

## Sosialisasi Dokumen Pendukung Perencanaan Partisipatif di Kabupaten Tolikara

Yannice Luma Marnala Sitorus, Normalia Ode Yanthy, Syamsudin Usman, Anggia Riani Nurmaningtyas

Kabupaten Tolikara belum terbiasa dengan program-program pembangunan yang berasal dari pusat sehingga akan sulit untuk mencari kesesuaian antara kebutuhan dasar yang warga inginkan dengan kebutuhan dasar menurut ketentuan pemerintah. Perlu masa adaptasi yang lama oleh warga dan oleh karena itu penduduk kampung perlu mendapat pendampingan dari pihak pemerintah, terutama pemerintah tingkat kampung dan distrik, dalam menyusun program pembangunan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi di kampung mereka. Kualifikasi sumber daya manusia di

kampung, khususnya aparat pemerintahan kampung sendiri dapat dikatakan masih rendah. Penentuan pimpinan pemerintahan kampung di sana lebih didasarkan pada ketentuan adat setempat, bukan pada kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Beberapa kepala kampung pada 25 distrik yang dikaji bahkan tidak sekolah. Pihak luar (pemerintah) pun harus dapat memahami kondisi masyarakat setempat agar penyusunan program pembangunan yang dilakukan tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, dan kearifan lokal.

Tabel 3. Matriks SWOT Kampung Belum Berkembang

IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komoditas unggulan pertanian dan peternakan</li> <li>Lahan adat yang luas</li> <li>Mayoritas warga adalah OAP</li> <li>Lembaga keagamaan punya peran penting dalam pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>SDM pemerintahan kampung dan adat</li> <li>SDM petani/ peternak/ pedagang (mayoritas tidak sekolah, tidak ada spesialisasi produk)</li> <li>Tenaga pelayanan publik (guru dan nakes) minim</li> <li>Fasilitas &amp; infrastruktur dasar minim</li> <li>Akses ke fasilitas layanan publik rendah</li> <li>Potensi kerusakan lingkungan besar (mayoritas menggunakan kayu bakar utk memasak), penyebaran penyakit akibat tidak ada sanitasi</li> </ol>
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<ol style="list-style-type: none"> <li>Dana Desa</li> <li>Dana Perimbangan Otsus</li> <li>Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Indonesia Timur</li> <li>Keberpihakan kepada OAP baik oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah</li> <li>Kota Wamena berpotensi sebagai tempat pemasaran produk-produk dari Tolikara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan dana desa yang optimal untuk meningkatkan perekonomian petani</li> <li>Pemanfaatan dana Otsus untuk memperkuat lembaga adat dan agama di kampung</li> <li>Menyiapkan badan usaha ekonomi kampung</li> <li>Memaksimalkan peran tokoh agama dalam setiap kegiatan pembangunan kampung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas SDM pemerintahan kampung dan lembaga adat lewat pelatihan/ pendampingan/ studi banding</li> <li>Pendidikan/pelatihan warga berdasarkan kebutuhan (kurikulum lokal)</li> <li>Peningkatan akses ke kampung/kelurahan dengan fasilitas layanan lebih lengkap</li> <li>Pengadaan/peningkatan kapasitas sumber pembangkit tenaga listrik</li> <li>Sosialisasi dampak negatif penggunaan kayu bakar, pengadaan BBM bersubsidi (minyak tanah)</li> <li>Sosialisasi dampak negatif BAB sembarangan, pengadaan fasilitas sanitasi komunal dilengkapi jaringan suplai air bersih</li> </ol>
TREATHS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum terbentuknya sistem pasar, baik lokal maupun regional, yang dapat menampung hasil panen petani; konsumen umumnya merupakan warga pendatang yang jumlahnya masih sedikit</li> <li>Komoditas unggulan (pertanian) sama dengan komdita dari Wmaena yang punya akses transportasi lebih baik</li> <li>Ketidaklancaran pasokan BBM dari luar Tolikara</li> <li>Kebijakan pembiayaan oleh pemerintah belum memperhatikan kondisi lokal (biaya hidup tinggi)</li> <li>Kurikulum pendidikan yang disamaratakan</li> <li>Masih ada anggapan soal keamanan yang belum stabil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun komunitas petani tingkat kampung</li> <li>Peningkatan akses ke fasilitas ekonomi</li> <li>Pemberian subsidi transportasi pengadaan BBM</li> <li>Pemerintah setempat dapat menyesuaikan kurikulum pendidikan sesuai kebutuhan (menambah muatan lokal)</li> <li>Memaksimalkan peran tokoh agama dalam pembinaan warga kampung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menciptakan 'sistem pasar lokal' dengan menumbuhkan kebutuhan keberagaman pangan dari warga lokal, misal mengubah pola konsumsi harian warga, agar terjadi proses 'jual beli' hasil pertanian antar warga setempat</li> <li>Pemerintah memberdayakan petani sekaligus mempersiapkan pasar untuk menampung hasil panen (sifatnya stimulus)</li> <li>Peningkatan kualitas SDM pemerintahan kampung dan lembaga adat lewat pelatihan/ pendampingan/ studi banding</li> <li>Pendidikan/pelatihan dan pendampingan warga berdasarkan kebutuhan (kurikulum lokal)</li> </ol>

Sumber: Ilalang, 2021

Setelah dokumen pendukung ini tersusun, hal terpenting berikutnya adalah penggunaan data yang ada dalam dokumen

tersebut oleh warga kampung sebagai dasar untuk membuat program pembangunan kampung setiap tahunnya. Agar warga dapat

memahami pentingnya data tersebut maka warga perlu pendampingan, khususnya oleh fasilitator, dalam setiap pelaksanaan Musrenbang kampung. Warga perlu dilatih agar berpikir kritis dan bertindak aktif serta mandiri dalam mencari solusi untuk setiap permasalahan di kampung mereka masing-masing.

Upaya sosialisasi pada tahap awal dilakukan pada aparatur negara yang terdiri dari antara lain para kepala distrik agar mendapat masukan guna memperbaiki prosesnya (lihat Gambar 3). Kemudian pada tahap akhir juga dilakukan sosialisasi hasil studi yang dilakukan oleh pihak LSM (lihat Gambar 4). Diharapkan kegiatan sosialisasi ini menjadi ajang transfer ilmu pengetahuan dari tenaga ahli kepada pihak pemerintah, khususnya aparat pemerintah tingkat distrik, agar kemudian dapat mendampingi kepala kampung dan warganya dalam menyusun program pembangunan kampung setiap tahun. Keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat antara lain dari tingkat kepedulian para peserta sosialisasi lewat sejumlah pertanyaan yang diajukan terkait strategi pembangunan yang dipaparkan. Tim tenaga ahli, terdiri dari dosen-dosen USTJ, berusaha memberikan jawaban sejelas mungkin atas sejumlah pertanyaan tersebut dan dapat diterima dengan baik oleh para peserta sosialisasi.



Gambar 3. Seminar Pendahuluan Bulan September 2021



Gambar 4. Seminar Akhir Bulan Desember 2021

Dokumen pendukung yang ditampilkan pada aplikasi dalam Excel ini lebih informatif sehingga mempermudah saat ingin mengakses

data tertentu. Data sekian ratus kampung tersedia pada dokumen ini yang ditampilkan juga dalam bentuk grafik atau diagram untuk mempermudah dalam menganalisis. Kelemahannya adalah bahwa tidak setiap pihak yang berkepentingan sudah memiliki fasilitas pendukungnya. Sumber energi listrik saja yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat masih sangat terbatas di sana apalagi perangkat komputer untuk mendukung operasional aplikasi dalam Excel tersebut. Untuk sementara ini data dari dokumen pendukung tersebut digunakan pemerintah kabupaten dalam rangka memberikan arahan dalam penyusunan program pembangunan di tingkat distrik.

## D. PENUTUP

### Simpulan

Kegiatan Penyusunan Dokumen Pendukung Perencanaan Partisipatif di Kabupaten Tolikara tahap pertama telah menghasilkan rumusan program pembangunan dari 306 kampung/kelurahan pada 25 distrik di Kabupaten Tolikara. Setelah sosialisasi dilakukan, diharapkan Pemerintah Kabupaten Tolikara, khususnya pemerintahan distrik dan kampung pada 25 distrik yang dikaji, dapat menjadikan dokumen ini sebagai acuan untuk memutuskan program-program pembangunan terpilih dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kampung yang diselenggarakan setiap tahunnya. Dan setiap anggaran pembangunan kampung, baik yang bersumber dari Dana Desa, Dana Otsus Papua, ataupun sumber lainnya, dapat dikelola secara optimal atau memberikan manfaat yang semaksimal mungkin pada seluruh warga kampung.

### Saran

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Tolikara pada umumnya dan kampung-kampung pada khususnya.

## E. DAFTAR PUSTAKA

Adiyoso, W. (2009). *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: ITS Press.



## Sosialisasi Dokumen Pendukung Perencanaan Partisipatif di Kabupaten Tolikara

Yannice Luma Marnala Sitorus, Normalia Ode Yanthy, Syamsudin Usman, Anggia Riani Nurmaningtyas

---

- BAPPEDA Kabupaten Tolikara. (2012). *Laporan Akhir Penyusunan RTRW Kabupaten Tolikara 2013-2033*.
- BPS Kabupaten Tolikara. (2020). *Kabupaten Tolikara Dalam Angka 2020*.
- BPS Provinsi Papua. (2019). *Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Papua Menurut Kabupaten/Kota, 2018*, diakses pada <https://papua.bps.go.id/dynamictable/2019/07/09/310/indeks-pembangunan-desa-provinsi-papua-menurut-kabupaten-2018.html>
- BPS Provinsi Papua. (2019). *Provinsi Papua dalam Angka Tahun 2018*.
- Browne, E. (2014): Community-Driven Development and Indigenous, Ethnic Minority, and Disability Issues. *Helpdesk Research Report*, 08.08.2014, diperoleh melalui internet [www.gsdr.org](http://www.gsdr.org). Diunduh pada tanggal 04 Februari 2015.
- Chambers, R. (2001). *PRA Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Ilalang. (2021). *Laporan Akhir Dokumen Pendukung Perencanaan Partisipatif di Kabupaten Tolikara Tahun 2021*. Karubaga: Bappeda Kab. Tolikara.
- Kementerian PPN/BAPPENAS. (2015). *Rencana Strategis Bidang Pemerintahan Desa*. Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah Tahun 2015, Jakarta, Rabu/29 Juli 2015.
- Widodo, S., Ginting, R., & Lazarusli, B. (2014). IbM Ipteks Bagi Perangkat Desa dan Kelembagaan Lokal di Desa Rogomulyo dan Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(02), 64-72. DOI: <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v5i2.717>